

BAB V

PENUTUP

Pada Bab V Penutup, memuat penjelasan mengenai bagian akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi untuk penelitian maupun pengembangan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivisme digital Aliansi BEM SI melalui gerakan #IndonesiaGelap serta mengkaji *trust issue* mahasiswa terhadap pemerintah dengan menggunakan kerangka Teori Gerakan Sosial Baru yang dikemukakan oleh Alain Touraine. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh melalui *Text Network Analysis* (TNA), *Social Network Analysis* (SNA), *Sentiment Analysis* (SA) dari platform Twitter/X dan Instagram, serta wawancara mendalam dengan lima informan anggota BEM SI, penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang menjawab dua rumusan masalah penelitian sebagai berikut.

Aktivisme digital yang dilakukan oleh Aliansi BEM SI melalui gerakan #IndonesiaGelap merepresentasikan bentuk partisipasi politik generasi muda di era digital yang dapat dianalisis melalui empat dimensi Teori Gerakan Sosial Baru Touraine.

Pertama, berdasarkan prinsip identitas, gerakan #IndonesiaGelap berhasil membentuk identitas kolektif mahasiswa melalui proses konstruksi sosial yang sistematis dan terstruktur. Kesadaran kolektif mahasiswa terbentuk sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dipersepsikan mengancam sektor pendidikan. Proses pembentukan kesadaran ini tidak bersifat spontan, melainkan melalui mekanisme validasi data yang dilakukan secara ketat dengan empat hingga lima kali konsolidasi antar organisasi mahasiswa.

Tagar #IndonesiaGelap menjadi simbol yang merepresentasikan keresahan dan kekhawatiran kolektif mahasiswa terhadap masa depan Indonesia, sekaligus mengandung harapan untuk membangun kembali visi bersama yang lebih baik. Simbol garuda hitam hadir sebagai penanda identitas yang menyatukan berbagai elemen gerakan tanpa sekat organisasional, menciptakan solidaritas yang melampaui batas-batas organisasi formal. Hasil TNA mengonfirmasi temuan wawancara dengan menunjukkan dominasi kata-kata seperti "Indonesia", "gelap", "rakyat", "pemerintah", "mahasiswa", dan "kebijakan" yang mencerminkan konstruksi identitas kolektif gerakan.

Kedua, berdasarkan prinsip oposisi, gerakan #IndonesiaGelap memiliki target kritik yang terartikulasikan dengan jelas yaitu pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya lembaga eksekutif yang dipandang memiliki kekuasaan untuk memperbaiki permasalahan namun tidak menggunakan kekuasaan tersebut secara optimal. Kebijakan yang paling mengecewakan mahasiswa meliputi RUU Minerba yang mengancam otonomi kampus sebagai institusi pendidikan, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang memangkas dana pendidikan, keterlibatan aparat dalam represi ruang sipil, serta stagnasi RUU Perampasan Aset yang dinilai tidak serius memberantas korupsi.

Bentuk penentangan dilakukan melalui berbagai strategi digital seperti kolaborasi posting antar akun organisasi, produksi infografis dan konten visual, penggunaan format meme, serta penyebaran konten secara terkoordinasi menggunakan tagar yang sama. Hasil SNA mengungkapkan struktur jaringan yang bersifat desentralisasi tanpa aktor tunggal yang mendominasi, dengan akun @itsdamiesites memiliki degree tertinggi sebesar 25 di Twitter/X dan @dickyahmd__ dengan degree 18 di Instagram, menunjukkan pola penyebaran informasi yang terdistribusi secara horizontal.

Ketiga, berdasarkan prinsip revolusi elektronik, platform Twitter/X dan Instagram terbukti efektif sebagai medium aktivisme digital dengan karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Twitter/X unggul dalam kecepatan penyebaran informasi berbasis teks dan pembangunan diskursus *real-time* dengan karakteristik warganet yang aktif, vokal, dan kritis. Instagram efektif untuk berbagi

konten visual melalui fitur *reels*, *story*, dan *add yours* yang mendorong partisipasi publik secara viral.

Strategi viralitas yang diterapkan mencakup penggunaan bahasa sederhana yang mudah dipahami, pendekatan agitasi untuk membangkitkan emosi publik, format meme untuk menarik perhatian, konten berdurasi singkat sesuai algoritma platform, serta kolaborasi dengan akun berpengaruh dari berbagai wilayah. Media sosial berhasil melampaui batasan geografis dengan memungkinkan transfer kajian dari Jakarta sebagai pusat koordinasi ke berbagai daerah seperti Malang, Surabaya, Semarang, dan kota-kota lainnya, membangun solidaritas lintas wilayah tanpa bergantung pada mobilisasi fisik yang memerlukan sumber daya besar. Keterlibatan mahasiswa dari berbagai universitas seperti UNTIRTA, UNPAD, dan UB dalam aksi di Patung Kuda membuktikan efektivitas media sosial dalam menjangkau partisipan lintas geografis.

Keempat, berdasarkan prinsip munculnya aktor gerakan dan upaya kolektif, gerakan #IndonesiaGelap tidak memiliki pemimpin tunggal melainkan merupakan gabungan dari berbagai elemen gerakan masyarakat sipil dengan kepemimpinan yang bersifat situasional, emergen, egaliter, dan non-permanen. Bentuk aksi konkret yang dilakukan mencakup aktivitas online berupa partisipasi *podcast*, produksi infografis dan kajian, penyebaran konten di media sosial, serta kampanye distribusi poster dan *flyer*, yang diintegrasikan dengan aksi offline berupa konsolidasi, demonstrasi turun ke jalan di Patung Kuda, dan audiensi dengan pihak terkait.

Mobilisasi massa dilakukan melalui penyebaran seruan aksi secara terkoordinasi dari akun BEM SI yang memiliki followers terbesar, dengan fitur *add yours* di Instagram menciptakan efek bandwagon yang mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai kalangan. Respons warganet terhadap konten gerakan didominasi oleh dukungan, diskusi, dan berbagi ulang konten, meskipun akun organisasi seperti BEM lebih rentan terhadap serangan buzzer dibandingkan akun pribadi.

Kelima, berdasarkan prinsip totalitas, gerakan #IndonesiaGelap memiliki tujuan yang terartikulasikan melalui 13 tuntutan yang mencakup dimensi kebijakan spesifik berupa pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, penolakan RUU TNI, dan

penghapusan efisiensi anggaran pendidikan; dimensi sistemik berupa perubahan pendekatan pemerintah agar lebih mendengarkan aspirasi rakyat; serta dimensi edukatif berupa peningkatan kesadaran publik untuk lebih kritis mengawal kebijakan negara. Meskipun tidak semua tuntutan dipenuhi oleh pemerintah, gerakan berhasil menciptakan tekanan politik yang signifikan sebagaimana diindikasikan oleh pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut mahasiswa sebagai "antek-antek asing", munculnya kontra-narasi "Indonesia Terang" dari pemerintah, berkurangnya intensitas pembahasan UU Minerba, revisi kebijakan efisiensi anggaran, dan reshuffle kabinet.

Sebagai temuan novelty penelitian, gerakan digital #IndonesiaGelap membuka peluang demokratisasi partisipatif yang lebih luas dibandingkan gerakan sosial konvensional melalui lima dimensi sekaligus. Dimensi pertama adalah demokratisasi akses dan partisipasi, di mana struktur jaringan yang desentralisasi memungkinkan siapa pun berkontribusi dalam diskursus politik tanpa memerlukan legitimasi formal atau posisi struktural tertentu.

Dimensi kedua adalah demokratisasi ruang publik dan artikulasi kepentingan, di mana media sosial menjadi arena kontestasi wacana yang setara antara masyarakat sipil dan negara, memungkinkan artikulasi kepentingan dari bawah secara langsung dan simultan tanpa dikuasai oleh gatekeeper sebagaimana terjadi pada media konvensional. Dimensi ketiga adalah demokratisasi responsivitas pemerintah, di mana masifnya partisipasi digital memaksa pemerintah menjadi lebih reaktif dalam menanggapi aspirasi publik sebagaimana dibuktikan oleh data sentimen negatif yang dominan di Twitter/X (60,66%) dan respons konkret pemerintah terhadap gerakan.

Dimensi keempat adalah demokratisasi geografis, di mana gerakan berhasil melampaui batasan spasial dengan membangun solidaritas nasional tanpa bergantung pada mobilisasi fisik, memungkinkan suara dari berbagai daerah termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk terartikulasikan dalam diskursus politik nasional. Dimensi kelima adalah demokratisasi verifikasi dan akuntabilitas, di mana pembentukan kesadaran kolektif berbasis pada rasionalitas dan verifikasi data melalui proses validasi yang ketat, menciptakan mekanisme

akuntabilitas horizontal di antara sesama aktivis sekaligus akuntabilitas vertikal terhadap klaim-klaim pemerintah.

Trust issue atau krisis kepercayaan mahasiswa terhadap pemerintah merupakan fenomena yang mendasari munculnya gerakan #IndonesiaGelap. Analisis terhadap *trust issue* ini dilakukan dengan menggunakan prinsip totalitas dari Teori Gerakan Sosial Baru Touraine yang mengukur kesadaran setiap individu dalam gerakan sosial serta sistem nilai atau tujuan yang diperjuangkan.

Faktor-faktor penyebab *trust issue* mahasiswa terhadap pemerintah dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama. Aspek pertama adalah kesenjangan antara janji dan realitas kebijakan, di mana terdapat inkonsistensi antara pernyataan publik pemerintah dengan produk kebijakan yang dihasilkan. Permasalahan ini bersifat struktural dan mencakup manipulasi terhadap konstitusi oleh pejabat publik yang menyebabkan erosi kepercayaan terhadap sistem hukum dan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Ketimpangan struktural yang sangat ekstrem, di mana satu persen populasi menguasai lima puluh sembilan persen sumber daya alam dan kekayaan negara, turut memperparah *trust issue* karena dipandang sebagai hasil dari kebijakan negara yang lebih berpihak pada pemilik modal daripada rakyat mayoritas.

Aspek kedua adalah krisis kepercayaan terhadap institusi negara yang ditandai oleh siklus negatif berupa kebijakan yang merugikan, protes masyarakat yang direspons dengan tindakan represif, dan ketiadaan perubahan kebijakan yang berarti. Ketimpangan dalam kecepatan pemrosesan undang-undang menjadi indikator prioritas pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, di mana RUU yang dianggap pro-rakyat seperti RUU Masyarakat Adat diproses sangat lambat, sementara UU yang dipandang menguntungkan aparat seperti UU TNI dan UU Polri diproses dengan cepat. Korupsi sebagai faktor fundamental yang merusak kepercayaan menunjukkan bahwa pejabat publik menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan rakyat, sementara pengingkaran janji politik menciptakan skeptisisme terhadap komitmen pemerintah dalam memenuhi harapan rakyat.

Aspek ketiga adalah pola komunikasi pemerintah yang reaktif dan berorientasi pencitraan. Pemerintah dipandang membiarkan masalah berkembang

terlebih dahulu, kemudian muncul dengan narasi penyelamatan atau kepahlawanan yang menciptakan persepsi bahwa kebijakan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang dan kepedulian yang tulus, melainkan pada kalkulasi pencitraan politik semata.

Manifestasi *trust issue* tersebut tercermin jelas dalam hasil Sentiment Analysis. Dominasi sentimen negatif di Twitter/X yang mencapai 60,66% mengonfirmasi karakteristik platform sebagai ruang kritik dan oposisi di mana pengguna mengekspresikan ketidakpuasan dan kritik secara terbuka dan eksplisit. Sentimen netral yang mendominasi Instagram sebesar 72,41% mencerminkan karakteristik platform yang lebih bersifat informatif dan diskursif, di mana *trust issue* lebih banyak termanifestasi dalam bentuk diskusi informatif dan ajakan untuk kritis yang tetap merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif tentang permasalahan kebijakan pemerintah.

Rekomendasi pemulihan kepercayaan publik dari perspektif mahasiswa mencakup beberapa hal penting. Pemerintah perlu memberikan afirmasi dan pengakuan terlebih dahulu terhadap keresahan dan kritik yang disampaikan masyarakat, bukan langsung menolak atau membuat kontra-narasi. Forum-forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) direkomendasikan sebagai wadah dialog yang objektif antara pemerintah dan masyarakat.

Ruang dialog yang dibuat harus berdampak nyata dan ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan secara berkelanjutan, serta melibatkan publik sejak awal proses pembuatan kebijakan, bukan setelah tekanan muncul. Undang-undang yang menyejahterakan rakyat harus diprioritaskan pembahasannya, penempatan pejabat yang kompeten sesuai bidangnya perlu dijamin, dan penghormatan terhadap ruang demokratis harus diwujudkan tanpa menggunakan aparat keamanan untuk merepresi demonstran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut mengenai aktivisme digital di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam analisis dengan memperluas cakupan platform digital yang dikaji, tidak terbatas pada Twitter/X dan Instagram saja tetapi juga mencakup platform lain seperti TikTok, YouTube, dan aplikasi pesan instan yang turut berperan dalam penyebaran narasi gerakan. Penggunaan metode analisis jaringan yang lebih canggih dengan dataset yang lebih besar juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur dan dinamika gerakan digital.

Penelitian komparatif antara gerakan #IndonesiaGelap dengan gerakan digital lainnya baik di Indonesia maupun di negara lain dapat memperkaya pemahaman teoretis mengenai karakteristik dan efektivitas aktivisme digital lintas budaya. Pengembangan kerangka teoretis yang mengintegrasikan Teori Gerakan Sosial Baru dengan teori-teori komunikasi digital dan demokrasi partisipatif juga diperlukan untuk membangun fondasi akademis yang lebih kokoh bagi studi aktivisme digital di masa depan.

5.2.2 Saran Praktis

Bagi organisasi mahasiswa dan aktivis gerakan sosial, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas aktivisme digital. Pemanfaatan karakteristik spesifik masing-masing platform perlu dioptimalkan, dengan menggunakan Twitter/X untuk membangun diskursus kritis dan opini publik sementara Instagram dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan memobilisasi partisipasi melalui konten visual yang menarik. Strategi kolaborasi antar akun organisasi dari berbagai wilayah perlu terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan dan membangun solidaritas lintas daerah.

Produksi konten yang berbasis pada kajian dan data yang terverifikasi harus dipertahankan untuk menjaga kredibilitas gerakan dan menghindari serangan buzzer yang menargetkan konten tidak faktual. Pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis antara gerakan pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan transfer pengetahuan dan kajian dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan. Konsistensi dalam mengawal isu perlu ditingkatkan agar tekanan politik yang telah diciptakan dapat bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada momentum tertentu saja.

5.2.3 Saran bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa *trust issue* mahasiswa terhadap pemerintah bersumber dari berbagai faktor yang bersifat struktural dan sistemik. Pemerintah perlu melakukan pembenahan fundamental untuk memulihkan kepercayaan publik. Konsistensi antara pernyataan publik dan produk kebijakan harus dijaga untuk menghilangkan persepsi inkonsistensi yang selama ini menjadi sumber ketidakpercayaan.

Pembukaan ruang dialog yang bermakna dengan mahasiswa dan masyarakat sipil perlu dilakukan secara proaktif sebelum situasi memanas, bukan sekadar respons reaktif setelah terjadi eskalasi konflik. Forum-forum konsultasi publik harus difungsikan secara optimal sebagai wadah artikulasi aspirasi yang berdampak nyata pada proses pembuatan kebijakan.

Prioritas pembahasan undang-undang perlu diseimbangkan dengan mendahulukan regulasi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pola komunikasi yang berorientasi pencitraan perlu diubah menjadi komunikasi yang transparan, konsisten, dan melibatkan partisipasi publik sejak awal proses perumusan kebijakan.

Penghormatan terhadap ruang demokratis dan hak untuk menyuarakan kritik harus dijamin tanpa menggunakan aparat keamanan untuk merepresi demonstran. Penempatan pejabat yang kompeten sesuai bidangnya dan bekerja dengan profesionalisme tanpa tendensi politik menjadi prasyarat untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Sensitivitas terhadap

keberagaman kondisi di berbagai wilayah Indonesia juga perlu ditingkatkan dengan melibatkan perspektif daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dalam proses pembuatan kebijakan nasional.

5.2.4 Saran bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai partisipan aktif dalam ruang publik digital memiliki peran penting dalam menjaga kualitas diskursus dan mendorong perubahan sosial politik. Partisipasi kritis dalam mengawal kebijakan negara perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan platform digital sebagai ruang artikulasi kepentingan. Sikap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial harus diimbangi dengan kemampuan memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut.

Solidaritas lintas wilayah dan lintas kelompok perlu terus dibangun untuk memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Kesadaran bahwa partisipasi politik tidak terbatas pada mekanisme formal seperti pemilihan umum perlu terus ditumbuhkan, dengan memahami bahwa aktivisme digital dan demonstrasi merupakan bentuk partisipasi demokratis yang sah dan penting dalam sistem demokrasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa era digital telah membuka babak baru bagi demokrasi partisipatif di Indonesia. Gerakan #IndonesiaGelap membuktikan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki kapasitas untuk membangun gerakan sosial yang terorganisir, berbasis data, dan mampu menciptakan tekanan politik yang signifikan melalui pemanfaatan platform digital.

Keberhasilan gerakan ini dalam membuka peluang demokratisasi pada berbagai dimensi sekaligus memberikan harapan bahwa relasi kuasa antara negara dan masyarakat dapat bertransformasi ke arah yang lebih setara dan partisipatif. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan momentum gerakan, meningkatkan konsistensi dalam mengawal isu, dan terus mengembangkan strategi aktivisme digital yang efektif untuk mendorong perubahan sosial politik yang substantif dan berkelanjutan.